

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Topik.

Skripsi ini akan membahas tentang kebijakan Rusia terhadap Suriah terkait permasalahan politik internal yang sedang terjadi di Pemerintahan Suriah, yang mana rakyat Suriah menuntut mundur Presiden Bashar Al-Assad. Tuntutan rakyat Suriah ini di latar belakang oleh keberhasilan perjuangan rakyat Tunisia, Mesir, dan Libya yang berhasil menuntut mundur rezim otoriter di ketiga negara tersebut. Tuntutan ini juga merupakan akumulasi dari ketidakpuasannya rakyat Suriah terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad yang dianggap otoriter. Bashar Al-Assad yang telah berkuasa sejak tahun 2000, mewarisi kekuasaan ayahnya Hafez Al-Assad, yang berkuasa selama tiga dekade di Suriah. Konflik ini kemudian memicu negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada Suriah. Negara Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara sekutu di Timur Tengah yang berada dalam naungan Dewan Keamanan (DK) PBB telah merampungkan draft resolusi untuk menerapkan embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Suriah untuk menghentikan penindasan terhadap para penentang Presiden Al- Assad. Resolusi ini hampir serupa dengan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap pemerintahan Khadafi beberapa waktu yang lalu. Namun sayangnya keputusan itu ditentang sekutu dekat Suriah, yaitu Rusia dan Cina sebagai dua negara pemegang hak veto terhadap resolusi yang ditawarkan DK PBB.

B. Latar Belakang Masalah.

Rusia adalah negara yang dulunya bagian dari Uni Soviet, juga sebagai pewaris tahta kekuasaan Uni Soviet. Negara ini mendapatkan hampir dua per tiga wilayah yang dulunya teritorial Uni Soviet, 50% penduduk dan aset-aset ekonomi serta persenjataannya. Rusia adalah negara yang kuat baik dari politik maupun militernya. Saat ini Rusia berusaha untuk kembali meraih status sebagai negara yang berpengaruh dalam dunia internasional karena statusnya yang sekarang jauh menurun dibandingkan dengan status Uni Soviet dulu. Pasca berakhirnya pemerintahan Uni Soviet pada tahun 1991, kemunculan negara baru yang memerdekakan diri dari Uni Soviet, hal ini juga berdampak pada Rusia karena negara ini adalah pewaris kebesaran Uni Soviet.

Suriah adalah koalisi penting bagi Uni Soviet. Perang dingin yang terjadi dulu memberikan dampak ketegangan yang tinggi pada akhirnya memicu konflik militer regional salah satunya perang Yom Kippur, yang merupakan perang Israel dengan Suriah dan Mesir. Selama perang, Israel maupun Suriah dan juga Mesir mendapatkan bantuan dari sekutunya yaitu Amerika dan Uni Soviet. Uni Soviet tampil untuk membantu Suriah dalam menghadapi serangan Israel yang mendapatkan dukungan dan sokongan dari Amerika. Namun bantuan Uni Soviet tidak dapat menghindarkan Suriah dari kekalahan dalam perang tersebut. Setelah mengalami kekalahan, Suriah mulai memperkuat pasukan militernya melalui program kerjasama pembangunan angkatan senjata dengan Uni Soviet yang menjadi Rusia sekarang. Aliansi strategis antara Suriah dan Uni Soviet berhasil mengurangi pengaruh kuat Israel di kawasan Timur Tengah. Hubungan

kedua negara tersebut terus berlanjut hingga runtuhnya Uni Soviet yang menghasilkan Rusia.

Selain dari aliansi kedua negara tersebut pada era Perang Dingin, Rusia dan Suriah terus meningkatkan hubungan antar kedua belah pihak hingga pecahnya konflik internal antara pemerintahan Bashar Al Assad dengan pihak oposisi yang menginginkan kemunduran pemerintah Bashar. Rakyat menuntut turunnya rezim Assad yang dianggap otoriter dan meminta pemerintah untuk menghapus undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak tahun 1963. Undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memenuhi kepentingan rakyatnya meskipun telah beberapa kali diperbaharui, karena rakyat Suriah menginginkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Banyaknya tindakan portes untuk memberhentikan rezim Bashar dilakukan oleh pihak oposisi, baik melalui demonstrasi, media, hingga melalui militer. Saat ini, proses penurunan rezim Assad telah berdiri sejak awal 2000-an oleh rakyat Suriah telah menghabiskan korban puluhan ribu nyawa baik dari sipil dan juga tentara pemerintahan.¹

Gejolak perpecahan setelah ditangkapnya 15 remaja oleh para tentara Bashar pada bulan Maret. Penangkapan 15 remaja tersebut dikarenakan slogan revolusi yang diteriakkan oleh rakyat di Tunisia, Mesir, dan juga Libya “As-Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam!” yang berarti “Rakyat/Ingin/Menumbangkan rezim!”. Slogan revolusi yang pernah dilihat dan dibaca di televisi yang menyiarkan revolusi

¹Hillary sebut Assad: Penjahat Perang.
<http://www.Republika.co.id/berita/internasional/global/12/02/29/m05agp-hillary-sebut-assad-penjahat-perang>.

Tunisia, Mesir, dan Libya pada dinding sekolah.² Karena 15 remaja tersebut, banyak terjadi demo di kota-kota Suriah yang menginginkan pemerintahan yang baru dengan menggulingkan Assad, hal inilah yang memicu kemarahan pemerintah yang akhirnya mereka mengerahkan tentara untuk menghentikan aksi protes dengan menggunakan militer dan kekerasan yang akhirnya menimbulkan banyaknya korban berguguran.

Penurunan rezim Assad dari pihak oposisi sampai saat ini belum terpenuhi akibat masih kuatnya dukungan militer dan birokrasi dari pihak Assad. Pertempuran yang terus berlangsung antara pihak pemerintah dan kubu oposisi, rakyat Suriah yang tidak berdosa dan tidak mengerti persoalan justru banyak yang menjadi korban, baik yang mengungsi ke luar negeri maupun yang tewas akibat peperangan tersebut³.

Konflik internal ini mendapat banyak sorotan dari banyak pihak hingga pihak Barat dan juga oposisinya, yang pada akhirnya pihak-pihak tersebut berusaha campur tangan dalam menyelesaikan konflik di Suriah. Pihak Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, berdasarkan sejarah dan kebijakan luar negerinya di Semenanjung Arab menginginkan Suriah yang demokratis dengan menggulingkan rezim Assad.

Gencarnya protes dan kecaman dunia internasional terhadap pemerintahan Bashar Al Assad, Rusia justru mengambil sikap pro terhadap rezim Presiden Bashar Al Assad.⁴ Negara ini nyatanya membantu Suriah untuk

² Trias Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2012, hal 44

³ Suriah Tunduk Pada Resolusi Damai Liga Arab.

<http://jaringnews.com/internasional/timur-tengah/4671/suriah-tunduk-pada-resolusi-damai-liga-arab>.

⁴ Azis Anwar Fachrudin.

<http://fsaijogja.wordpress.com/2013/01/12/suriah-iran-rusia-cina/>

menghadapi desakan dan campur tangan internasional dalam penyelesaian konflik domestiknya dengan mengirimkan senjata untuk menindak para oposisi. Selain memveto rancangan resolusi untuk Suriah yang dikeluarkan oleh DK Keamanan PBB, Rusia juga mengirimkan senjata-senjata modern, seperti kendaraan lapis baja, drone, dan rudal untuk mendukung militer Bashar Al Assad memerangi pejuang oposisi.⁵

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bisa diajukan bahwa pokok permasalahan sebagai berikut :

Mengapa pemerintah Rusia memberikan bantuan militer kepada pemerintahan Suriah dalam pemulihan stabilitas politik dan keamanan ?

D. Landasan Teori.

Dalam penelitian ini, konsep dan teori yang dapat dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional dan teori geopolitik. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang tampaknya melekat erat untuk menjabarkan perilaku Internasional. Berbicara kepentingan nasional, maka akan selalu mengarah kepada tujuan sebuah negara ataupun

⁵ Pasok Senjata Modern Rusia Tingkatkan Hubungan Dengan Rezim Suriah
<http://daulahislam.com/news/suriah-news/pasok-senjata-modern-rusia-tingkatkan-hubungan-dengan-rezim-suriah-bashar-al-assad.html>

rezimnya berdasarkan pada representasi dari bangsanya. Yang biasanya di pengaruhi oleh pengalaman sejarah.

Konsep Kepentingan Nasional bersumber dari pemakaian sintesis nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan situasi dimana negara mengambil tempat dalam politik dunia. Kepentingan Nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Sebuah negara akan mempertahankan kepentingan nasional negaranya dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih memilih untuk mempertahankan keseimbangan dan melanjutkan usaha kearah tujuannya daripada harus mengubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru. Kepentingan Nasional merupakan tujuan tindakan ngara dalam politik internasional.

Dalam kepentingan nasional, peran negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam hubungan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini akan menjadi kepentingan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat maupun kondisi keamanan maupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat akan terbatas.⁶ Ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial budaya.

⁶ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89

Kepentingan juga didasari akan suatu 'power' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi sudut pandang masyarakat internasional sebagai negara yang menjadi hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.⁷ Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional;

“...hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam memproduksi. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional...”⁸

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh oleh demografi, karakter, budaya, bahkan sejarah yang dimiliki oleh negara tersebut. Sehingga negara saat ini melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral semua itu kembali kepada kebutuhan suatu negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang

⁷ P. Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 163

⁸ Charles. P. Kindlerberger. Hal.21

dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

“Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik”.⁹

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat banyak aspek yang menjadi identitas suatu negara. Hal tersebut juga dapat dilihat dari sejauh mana target suatu negara dalam memenuhi pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa pentingkah identitas tersebut maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting.

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memiliki arti berbagai macam hal yang secara pemikiran, kesaamaan dengan isinya, konsep ini tergantung dari tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.¹⁰ Hal ini dapat menjelaskan bahwasanya kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang negara miliki, negara yang menjadi aliansi dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan

⁹ Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. Hal. 115

¹⁰ P. Anthonius Sitepu. 2011. Hal. 165

kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan untuk bekerja sama.

Mochtar Mas'ued menjelaskan konsep ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Hal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat menghasilkan kemampuan akan menilai kebutuhan maupun keinginan pribadi yang sejalan dengan itu berusaha menyeimbangkan kebutuhan maupun keinginan dilain pihak. Konsep ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya.¹¹ Kemampuan disini menjadi batasan yang didukung dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).

Kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka mempunyai kegunaan. Hal ini dijelaskan oleh James N. Rosenau yang pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.¹² Dengan demikian negara yang menjalin kerjasama tidak akan menyesal suatu saat nanti. Kondisi memperjalas tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak yang berencana melakukan kerjasama.

¹¹ Ibid, Hal. 166

¹² Mochtar Mas'ued. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES. Hal. 34

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar dari kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai inti yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.¹³ Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasil dan fungsi yang dirasakan lebih baik.

peran aktor dalam hal ini yaitu negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.¹⁴ Tindakan ini tergantung dari seberapa besar kekuatan yang dimiliki negara tersebut. Jika telah menemui poin penting, maka negara akan merubah alur yang awalnya kepentingan biasa menjadi kepentingan yang lebih kuat dan baru. Kepentingan ini dilakukan dengan tetap menjalankan kepentingan awal atau merubah secara penuh kepentingannya tanpa menggunakan dasar dari kepentingan yang ingin dicapai sebelumnya.

¹³ Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 67-69

¹⁴ Ibid, Hal. 68

Kepentingan itu merupakan strategi dalam menjalan sebuah kerjasama demi memenuhi kepentingan kepentingannya. Negara menggunakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dimana strategi dilakukan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan dicapai nantinya. Selain itu negara sebagai aktor utama dalam catur internasional harus memiliki nilai yang menjual dalam arti ada kemampuan yang dimilikinya, sehingga ia disegani oleh lawannya yang menjadi bahan pertimbangan kerjasama. Seperti yang digambarkan oleh Jon C. Pevehouse dalam bukunya yang berjudul *International Relations*:

“Actor use strategy to pursue good outcomes in bargaining with one or more other actors. States deploy power capabilities as leverage to influence each other’s actions. Bargaining is interactive, and requires an actor to take account of other actor’s interests even while pursuing its own.”¹⁵

Di rana internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan yang membahas mengenai kepentingan tiap aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang ada dalam diri negara. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan diperjuangkan dalam sebuah hubungan.

Untuk memetakan *national interest*, klasifikasi dari Donald E. Nuechterlin membagi menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi yang dimaksud yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan

¹⁵ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse. 2010. *International Relations*. Longman: New York. Hal. 71

perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.

2. Kepentingan Pertahanan

Kepentingan pertahanan meliputi kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.

3. Kepentingan Tata Internasional

Kepentingan tata internasional yang dimaksudkan yaitu kepentingan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.

4. Kepentingan Ideologi

Kepentingan ideologi merupakan kepentingan yang berkaitan dengan pandangan hidup.¹⁶

Teori Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata yang disebut geografi dan politik. Geografi sendiri adalah ilmu tentang bumi.¹⁷ Sedangkan politik adalah ilmu kenegaraan atau tata negara.¹⁸ Geografi dan politik adalah hal yang berkaitan satu sama lain. Hal ini dapat terlihat pada peristiwa politik yang selalu berlangsung dengan tujuan geografi dan sebaliknya, geografi dapat mempengaruhi suatu peristiwa politik.¹⁹

¹⁶ Nuechterlin dalam Rudy, T. M. 2002. Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: Refika Aditama. Hal. 62

¹⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arloka. Hal. 199

¹⁸ Ibid. Hal. 608

¹⁹ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional(alih bahasa Wawan Juanda). Jakarta: Putra A. Baldin. Hal. 84

Menurut Dikshit, “geografi politik merupakan suatu analisis geografis dari gejala politik atau dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari keseiringan spasial (*spatial concomitants*) dari politik”.²⁰ Sedangkan geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan geografi negara untuk menentukan kebijakan demi mencapai tujuan nasional. Geostrategi juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan untuk mewujudkan tujuan politik.²¹

Geostrategi memiliki hubungan dengan Geopolitik. Geopolitik sangat diperlukan bagi negara untuk menentukan suatu kebijakan strategis karena geopolitik menjelaskan makna strategis dan politis dari suatu wilayah. Analisis geopolitik diperlukan oleh suatu negara untuk memperkuat posisinya dalam lingkungan internasional. Ketika suatu negara mempertimbangkan geografi dalam pengambilan keputusan dari kebijakan politik luar negerinya maka dapat disimpulkan sebagai Geostrategi.

Nicholas J. Spykman, ilmuwan geografi politik mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan *rimland theory*. Teori ini menekankan bahwa kekuatan dunia tidaklah terletak di pusat bumi melainkan didaerah pinggiran/*rimland* seperti Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Timur Jauh.²² Karakteristik

²⁰ Dikshit. 1982. Dalam N. Daldjoeni. 1991. Dasar-Dasar Geografi Politik. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 15

²¹ Elli Malihah. Geostrategi Indonesia.

http://file.upi.edu/direktori/FPIPS/M_K_D_U/196604251992032-ELLY_MALIHAN/Silabi_SAP_Bahan_Kuliah_PKN_Elly_Malihah/Tambahan_PKN/GEOSTRATEGI_illging.pdf

²² Jack C. Plano dan Roy Olton. Op. Cit. Hal. 84

dari wilayah ini sebagian bersifat kontinental dan sebagian lagi bersifat oceanis.²³

Pemikiran Spykman tentang *rimland theory* merupakan sebuah kritik atas pemikiran Mackinder tentang *heartland theory*. Jika Mackinder menekankan akan pentingnya penguasaan wilayah pusat benua yaitu Eurasia (Eropa Timur dan Asia Tengah). Maka sebaliknya, Spykman percaya bahwa kawasan pinggiran merupakan pusat kekuatan dunia.²⁴ Untuk menguasai dunia maka harus terlebih dahulu menguasai wilayah pinggiran. Kombinasi dari *sea power* dan *land power* yang dimiliki kawasan pinggiran benua dapat dengan mudah menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan memiliki akses pada mobilitas. Terkait dengan teori *rimland* yang sudah disampaikan, Spykman kemudian memunculkan sebuah slogan yang berbunyi “*Who control the rimland rules Eurasia, Who rules the Eurasia controls the destinies of the world*”.²⁵

E. Hipotesa.

Sesuai dengan penjabaran pokok permasalahan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tindakan Pemerintah Rusia memberikan bantuan kepada pemerintahan Suriah terkait pemulihan stabilitas politik dan keamanan karena:

- (1) Kepentingan Rusia dalam konflik internal Suriah adalah untuk mempertahankan identitas

²³ N. Daldjoeni. 1991. Dasar-Dasar Geografi Politik. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 196

²⁴ Martin Ira Glassner. 1993. *Political Geography*. New York: John Wiley & Sons, Inc. Hal. 227

²⁵ N. Daldjoeni. 1991. Op. Cit. Hal 197

perekonomiannya di negara tersebut, dimana Rusia telah menjalin kerjasama dengan pemerintahan Suriah yang berkuasa. Seperti perdagangan minyak, persenjataan dan kerjasama bilateral.

- (2) Rusia tidak ingin kehilangan aliansi terhadap Suriah dan tidak ingin kehilangan pengelolaan atas Pangkalan Tartus yang merupakan warisan Uni Soviet.
- (3) Letak geografis Suriah yang strategis berbatasan dengan Israel yang notabene aliansi dekat Amerika Serikat, dan Lebanon yang merupakan musuh Israel yang notabene aliansi Amerika Serikat.

F. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara objektif tentang sebuah permasalahan tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

Memberikan sebuah gambaran dan penjelasan tentang kepentingan Rusia mengenai Kebijakan Rusia terhadap krisis yang sedang terjadi di Suriah.

G. Jangkauan Penelitian.

Jangkauan penelitian ini menggunakan jangka waktu dari awal krisis domestik Suriah tahun 2011-2013 yang hingga saat ini krisis tersebut masih belum menemukan titik terang dan sedikit mengungkit perihal sejarah Rusia dan Suriah yang terkait dalam hal aliansi sejak dulu pada masa Rusia masih bernama Uni Soviet di era perang dingin.

H. Metode dan Teknik Penelitian.

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan majalah. Selain dari sumber tersebut pencarian data juga dilakukan dengan melakukan pencarian di berbagai sumber data internet yang mampu menunjang karya tulisan skripsi ini dengan sumber sumber yang dapat dipercaya.

a) Jenis Penelitian.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif eksplanatif untuk menggambarkan tentang kebijakan Rusia terhadap Suriah. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang serta perilaku yang diamati.

b) Data dan Jenis.

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

I. Rencana Sistematika Penelitian.

Secara keseluruhan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan disusun secara sistematis yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang alasan pemilihan topik, latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, teknik penelitian, rencana sistematika penelitian.

Bab II : KONFLIK DI SURIAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum Suriah dan konflik di Suriah yang menjadi obyek penelitian.

Bab III : BANTUAN RUSIA TERHADAP SURIAH

Pada bab ini, penulis membahas respon internasional terhadap konflik Suriah, dan bantuan Rusia terhadap Rezim Bashar Al-Assad dalam konflik internal Suriah.

Bab IV :KEPENTINGAN RUSIA DI SURIAH

Bab yang akan mengulas permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini yaitu tentang apa kepentingan yang ingin dicapai Rusia dengan mendukung Rezim Assad di Suriah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan Bab penutup dari penulisan penelitian yang perlu memberikan beberapa kesimpulan dari data yang telah di ambil dan di teliti.

BAB VI : DAFTAR PUSTAKA